

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hak pendidikan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak pendidikan dapat diperoleh siapa saja dan hak ini harus terpenuhi. Namun pada kenyatannya sering terjadi ketidakseimbangan dalam hak pendidikan terutama dalam hal biaya. Tingginya biaya pendidikan menjadi penyebab utama bagi siswa yang berhenti sekolah (Ayunda & Yustitianingtyas, 2025). Jumlah peserta didik putus sekolah tingkat SMA di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 6.716 siswa, dengan provinsi Jawa Barat berada diposisi keenam dengan jumlah peserta didik putus sekolah sebanyak 286 siswa (Kemendikdasmen, 2025). Angka ini menunjukkan bahwa masalah putus sekolah masih menjadi tantangan besar di Jawa Barat, terutama di kalangan siswa yang berasal dari keluarga marginal. Alasan utama yang menjadi penyebab siswa putus sekolah meliputi kondisi ekonomi keluarga yang lemah, rendahnya motivasi anak, kurangnya dukungan dari keluarga, serta pengaruh lingkungan dan pergaulan (Farianti et al., 2024).

**Tabel 1. 1** Jumlah Peserta Didik Putus Sekolah Tingkat SMA Tiap Provinsi berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

<b>Provinsi</b>	<b>Jumlah Siswa Laki-laki dan Perempuan yang Putus Sekolah</b>
Prov. Sumatera Utara	980
Prov. Jawa Timur	737
Prov. Nusa Tenggara Timur	548
Prov. Sulawesi Selatan	409

<b>Provinsi</b>	<b>Jumlah Siswa Laki-laki dan Perempuan yang Putus Sekolah</b>
Prov. Nusa Tenggara Barat	385
<b>Prov. Jawa Barat</b>	<b>286</b>
Prov. Sumatera Selatan	281
Prov. Jawa Tengah	226
Prov. Kalimantan Barat	211
Prov. Sumatera Barat	208
Prov. Aceh	193
Prov. Maluku	186
Prov. Banten	177
Prov. Sulawesi Tengah	159
Prov. Papua Pegunungan	158
Prov. Sulawesi Tenggara	154
Prov. Papua Tengah	151
Prov. Gorontalo	147
Prov. Maluku Utara	141
Prov. Riau	125
Prov. Lampung	118
Prov. Kalimantan Tengah	98
Prov. Papua Barat Daya	95
Prov. Sulawesi Barat	90
Prov. Jambi	81
Prov. Kalimantan Timur	57
Prov. Bengkulu	52
Prov. Papua Barat	51
Prov. Kalimantan Utara	39
Prov. Kalimantan Selatan	34
Prov. Papua	33
Prov. Sulawesi Utara	24
Prov. Kepulauan Riau	23
Prov. Papua Selatan	23
Prov. D.K.I. Jakarta	13
Prov. Kepulauan Bangka Belitung	12
Prov. Bali	11
Prov. D.I. Yogyakarta	0
Luar Negeri	0
<b>Indonesia</b>	<b>6716</b>

Siswa marginal itu sendiri diartikan sebagai anak yang hidup dalam kondisi terpinggirkan baik secara geografis, ekonomi, maupun sosial (Sandora et al., 2019). Kelompok yang sering kali dikategorikan sebagai siswa marginal yaitu anak jalanan, anak dari keluarga miskin, anak korban

kekerasan, pelacuran anak, dan anak terlantar (Efendi & Wahyudi, 2024).

Kelompok marginal yang disebutkan merupakan kelompok anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan kultur maupun struktur menjadikan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, bahkan sering kali dilanggar hak-haknya (Suyanto, 2010). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, mengatakan bahwa masalah utama masyarakat terpinggirkan di wilayah perkotaan diantaranya kemiskinan, akses pendidikan, Kesehatan, dan diskriminasi serta marjinalisasi (Hidayat et al., 2024). Hal tersebut didukung oleh data jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di kota Depok pada tahun 2022-2023 sebesar 940 anak, yang terdiri dari 25 anak balita terlantar, 327 anak terlantar 6-17 tahun, 186 anak berhadapan dengan hukum, 58 anak jalanan, 200 anak dengan kedisabilitasan, 142 anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan 2 anak yang menjadi korban tindakan kekerasan (Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2023). Anak-anak yang disebutkan merupakan anak yang rentan terhadap pelanggaran pemenuhan hak-haknya, termasuk dalam pendidikan.

Siswa yang termarjinalkan tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan yang bermutu. Padahal dalam UUD 1945 pasal 31 yang menjelaskan bahwa hak setiap warga negara adalah mendapatkan pendidikan dan wajib menjalani pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional pasal 5 berbunyi “Setiap warga Indonesia tanpa terkecuali mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan yang

berkualitas". Maka dari itu, Sekolah Master Indonesia hadir untuk memenuhi akses pendidikan terhadap kelompok-kelompok yang termarjinalkan. Sekolah Masjid Terminal adalah sekolah yang dikenal dalam menampung anak-anak jalanan, masyarakat tak mampu dan lain sebagainya. Tujuan sekolah ini adalah memberikan pendidikan alternatif bagi kaum marjinal yang tidak bisa mengakses pendidikan yang layak (Rahman & Anwar, 2023).

Sekolah yang dibangun di Kawasan Terminal Depok ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaan program dan kebijakannya untuk menyesuaikan kondisi siswa di sekolah tersebut. Sekolah ini memiliki sistem pembelajaran yang didasari oleh nilai keagamaan (Rahman & Anwar, 2023). Dengan latar belakang siswa yang berbeda-beda dan kehidupan mereka yang keras, tentunya Sekolah Master Indonesia berusaha memperbaiki pola dan karakter siswanya terlebih dahulu melalui strategi pengajaran yang dilakukan oleh para relawan. Pendekatan yang digunakan harus secara emosional terlebih dahulu (Rohmawati & Amirudin, 2020). Sekolah ini tidak mendidik secara akademik saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan emosional, sosial, dan spiritual siswanya (Rahman & Anwar, 2023).

Sekolah Master Indonesia bukan hanya sebagai tempat mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa yang dapat menunjang pemenuhan pendidikan siswa itu sendiri. Model pendidikan yang dijalankan mencerminkan upaya pemenuhan

kebutuhan anak secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Teori tersebut menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan tingkat atas, setiap individu harus memenuhi kebutuhan tingkat bawahnya terlebih dahulu (Sulistiana & Hidayati, 2023).

Dalam teori ini memuat lima tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk ke tingkat selanjutnya yaitu kebutuhan fisiologi, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, hingga aktualisasi diri (Setiawan, 2014).

Dalam konteks ini, pendekatan Maslow relevan digunakan untuk memahami bagaimana sekolah memenuhi kebutuhan belajar anak untuk menunjang pemenuhan pendidikannya secara maksimal.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji isu-isu pendidikan anak marginal dari berbagai perspektif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti, hasil studi menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah yaitu pembebasan biaya pendidikan dan penyesuaian model kurikulum sangat baik dalam membantu pemenuhan hak pendidikan anak, terutama anak disekitar wilayah KBQT. Selain itu, berdasarkan teori partisipasi masyarakat juga secara tidak langsung KBQT telah sejalan dan telah mewujudkan *civic participation* dengan cukup baik. KBQT telah membantu pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan untuk warga negara (Damayanti et al., 2024).

Penelitian ini hanya membahas mengenai strategi yang dilakukan KBQT dalam menyesuaikan kondisi anak-anak marginal dalam aspek pembiayaan

dan pembelajaran, belum mengkaji aspek kebutuhan belajar anak secara mendalam.

Hasil studi lain menunjukkan bahwa sekolah rakyat mendukung hak pendidikan anak yang merata dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis komunitas, memperkuat nilai-nilai kesetaraan, dan mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pendidikan. kurikulum juga menekankan keadilan sosial, empati, dan pemberdayaan ekonomi melalui keterampilan hidup, yang menunjukkan bahwa pendidikan dapat mengubah dunia. untuk menghasilkan kesadaran transformatif, pendidikan emancipatori berbasis komunitas sangat penting. ini menguatkan argument dalam teori pendidikan kritis (Paulo Freire) bahwa proses pendidikan harus berakar pada konteks sosial siswa. Pemenuhan kebutuhan belajar anak belum dibahas secara menyeluruh dalam studi ini (Rizqillah & Ulum, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, menyatakan bahwa PKBM Pengayoman memainkan peranan penting dalam membimbing masyarakat marginal menghadapi kendala pendidikan, ekonomi, dan akses pembelajaran agama. Masyarakat cenderung menjalankan agama secara praktis, dipengaruhi oleh tradisi lokal seperti tahlilan dan yasinan, namun tetap membutuhkan bimbingan dalam membaca Al-Qur'an dan memahami ilmu fiqh. Penelitian ini lebih menunjukkan pentingnya pendidikan nonformal dalam mengatasi problem literasi masyarakat marginal. Namun penelitian ini masih berfokus pada masyarakat umum, bukan spesifik pada

anak-anal marginal. Penelitian ini juga tidak membahas secara langsung dimensi kebutuhan belajar anak secara mendalam (Paratiwi, 2025).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah dikaji, menunjukkan bahwa isu pemenuhan hak pendidikan bagi anak marginal telah banyak dibahas dari sisi akses, strategi, dan pendekatan komunitas. Namun, Pemahaman tentang bagaimana sekolah nonformal dapat menjadi ruang pemenuhan kebutuhan siswa secara menyeluruh belum banyak dibahas secara mendalam. Belum banyak pula penelitian yang mengaitkan pendidikan nonformal dengan tahapan kebutuhan Maslow dalam konteks anak-anak marginal. Maka dari itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Sekolah Master Indonesia mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut dan membantu siswa marginal dalam mencapai hak pendidikannya secara utuh. Mengingat fokus penelitian ini adalah pada proses pendidikan di sekolah, maka subjek penelitian selanjutnya disebut sebagai siswa marginal.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam bidang PPKn Kemasyarakatan. Hal tersebut didasarkan pada fokus kajian yang menelaah pemenuhan hak pendidikan siswa marginal melalui peran masyarakat dan lembaga pendidikan alternatif, khususnya di Sekolah Master Indonesia. Pendidikan ini memandang pendidikan sebagai bagian dari praktik kewarganegaraan yang hidup dalam realitas sosial, bukan semata-mata sebagai kebijakan formal negara. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan pemenuhan

hak pendidikan pada posisi tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat.

Penelitian ini juga sebagai gambaran dari bentuk implementasi nilai pancasila, konstitusi dan juga menggambarkan bentuk partisipasi warga negara. Secara konstitusional, penelitian ini merupakan manifestasi dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta bentuk implementasi dari nilai keadilan sosial yang tertuang dalam sila kelima Pancasila. Kemudian, fenomena Sekolah Master sebagai lembaga pendidikan alternatif juga menggambarkan bentuk dari partisipasi kewarganegaraan (*civic participation*), yang mana masyarakat berpartisipasi dan mengambil peran negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak warga negara yang termarginalkan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa persoalan yang penting untuk dikaji lebih lanjut mengenai upaya dalam pemenuhan hak pendidikan siswa yang termarginal, khususnya siswa yang bersekolah di SMA Terbuka Master. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pemenuhan hak pendidikan siswa marginal di Sekolah Master Indonesia?

2. Bagaimana Sekolah Master Indonesia memenuhi hak pendidikan siswa marginal berdasarkan tahapan kebutuhan dalam hierarki kebutuhan Maslow?

### C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

#### 1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pemenuhan hak pendidikan bagi pada siswa marginal yang bersekolah di Sekolah Master Indonesia melalui pendekatan teori hierarki kebutuhan Maslow, khususnya bagaimana sekolah ini memenuhi hak pendidikan bagi siswa dari kelompok marginal pada jenjang SMA.

#### 2. Subfokus Penelitian

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian dan memperjelas arah penelitian, maka fokus penelitian ini dijabarkan ke dalam beberapa subfokus yang lebih spesifik. Subfokus-subfokus tersebut bertujuan untuk mengarahkan pengumpulan dan analisis data secara lebih terstruktur.

##### 1. Bentuk pemenuhan hak pendidikan siswa marginal di Sekolah Master Indonesia

Subfokus ini akan membahas berbagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang diberikan kepada siswa marginal di Sekolah Master Indonesia. Tidak hanya dari segi akses belajar, tetapi juga fasilitas, kenyamanan, dan perhatian terhadap kondisi sosial siswa.

Pemenuhan ini terlihat dari program-program yang dibuat oleh pengelola Sekolah Master Indonesia.

2. Pemenuhan kebutuhan hak pendidikan siswa marginal berdasarkan teori kebutuhan Abraham Maslow

Subfokus ini akan membahas mengenai pemebuhan kebutuhan dasar siswa yang akan menunjang terpenuhinya hak pendidikan siswa tersebut seperti kebutuhan fisiologis (makanan, pakaian, dan tempat belajar), kebutuhan akan rasa aman (dukungan, perlindungan), kebutuhan sosial atau rasa ingin dicintai (interaksi, rasa memiliki), kebutuhan penghargaan (apresiasi, pencapaian), dan kebutuhan aktualisasi diri (potensi, mimpi, keterampilan hidup).

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam upaya memahami dan mengatasi permasalahan pekerja anak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak siswa dalam pendidikan nonformal pada kelompok marginal seperti anak jalanan dan anak yang memiliki keterbatasan dalam akses pendidikan. Hasil penelitian dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji isu serupa.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Lembaga Pendidikan Alternatif

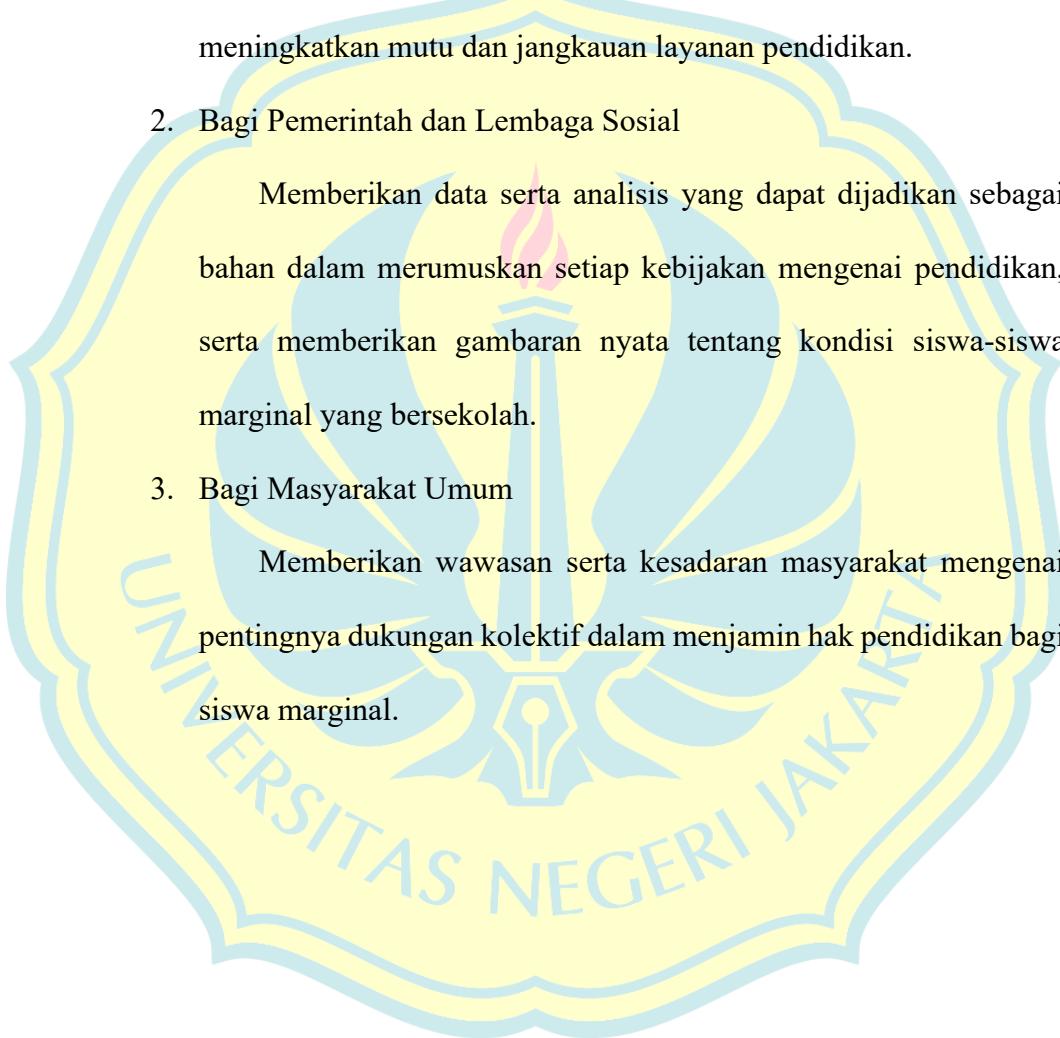
Memberikan masukan tentang strategi yang efektif dalam pemenuhan hak pendidikan siswa marginal, sehingga dapat meningkatkan mutu dan jangkauan layanan pendidikan.

2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Sosial

Memberikan data serta analisis yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam merumuskan setiap kebijakan mengenai pendidikan, serta memberikan gambaran nyata tentang kondisi siswa-siswa marginal yang bersekolah.

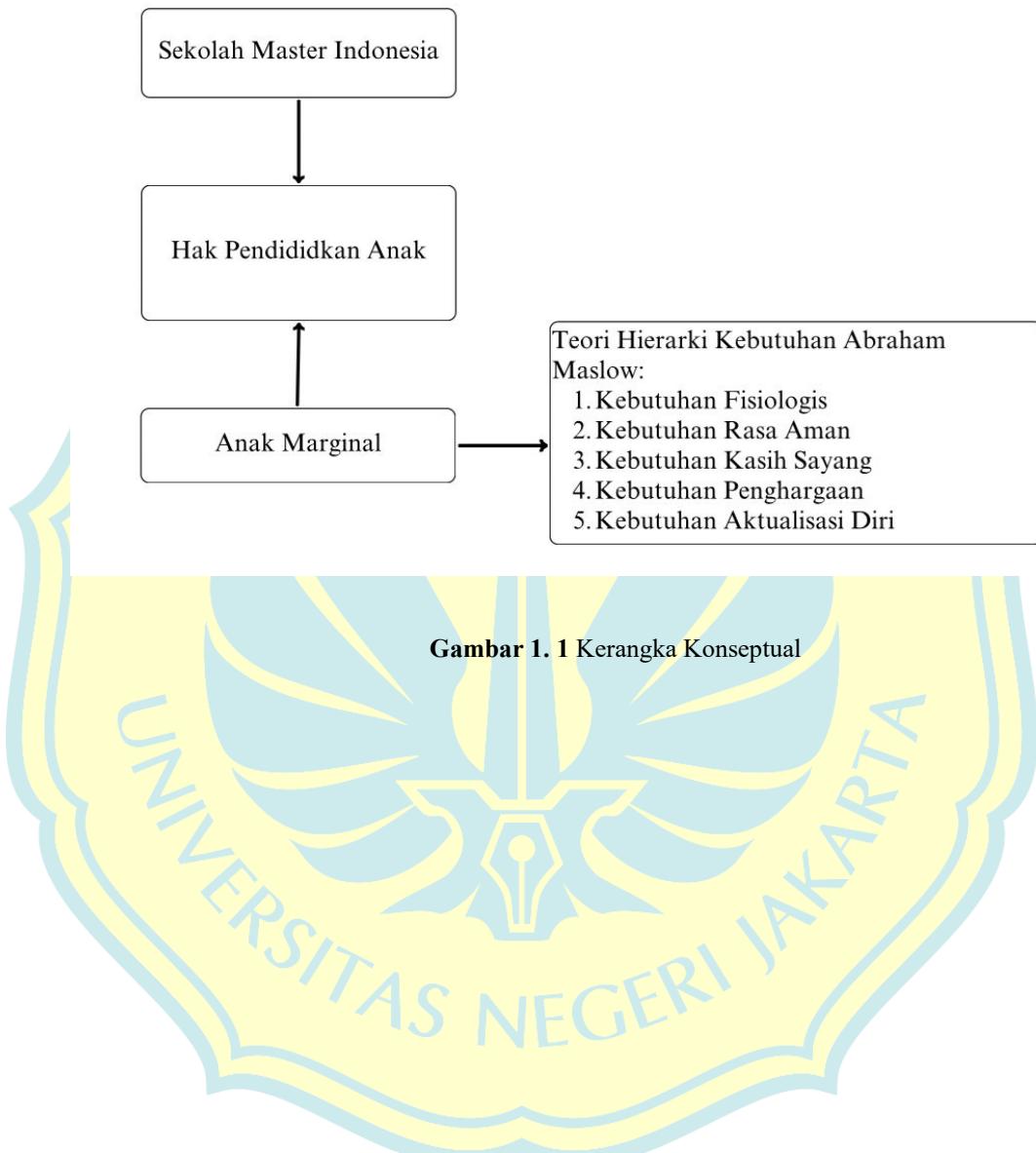
3. Bagi Masyarakat Umum

Memberikan wawasan serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dukungan kolektif dalam menjamin hak pendidikan bagi siswa marginal.



*Intelligentia - Dignitas*

### E. Kerangka Konseptual



*Intelligentia - Dignitas*